

Peran Pemerintah Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Di Kota Tomohon

Novlin H. S. Tuelah¹
Herman Nayoan²
Stefanus Sampe³

Email Korespondensi: Stefanus_sampe@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Tomohon dalam penanganan wabah Covid- 19 di kota Tomohon. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengontrol lebih sedikit korban akibat COVID-19 adalah pembatasan sosial, meningkatkan tes, telusur, dan treatment, serta mempersiapkan rumah sakit dan tenaga kesehatan. Serta peran pemerintah dalam penanganan covid 19 di sektor ekonomi sosial yaitu dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat guna mencukupkan kebutuhan masyarakat

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Penanganan, Covid-19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (work from home), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.

Pemerintah Indonesia sendiri memilih untuk melakukan social distancing guna memutus rantai penyebaran virus corona. Alih – alih melakukan lockdown pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Terbaru pemerintah menghimbau bagi warga negara Indonesia untuk tidak melakukan mudik, guna mencegah rantai penyebaran di daerah. Keputusan pemerintah pusat menjadi ujung tombak memutus rantai penyebaran covid-19 di Indonesia. Namun keputusan ini tetap saja harus di kritisi apakah masi perlu opsi lockdown dilakukan ataukah tidak

Hingga 1 Maret 2021 di Indonesia berdasarkan data yang dibagikan satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada senin sore, tercatat ada 6.680 kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19 . data tersebut terhitung sejak pukul 12,00 WIB Minggu (28/2/2021) hingga Senin pukul 12.00 WIB . sehingga secara akumulatif ada 1.341.314 orang. di Sulawesi Utara Total , di Sulawesi Utara jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 14.947 orang , dan di Kota Tomohon Jumlah

pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 1.518 orang dan masih terus terjadi penambahan pasien yang terpapar covid.

Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan tentang covid dalam rangka penanganan virus corona, diantaranya :

1. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang "Penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang "Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19).
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
4. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 162 Tahun 2020 tentang "Penetapan Perpanjangan Status tanggap darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .
5. SK Wali Kota Nomor 159 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menerbitkan Maklumat Wali Kota Tomohon Nomor 67/WKT/IV-2020 tentang Penegasan Imbauan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 di Kota Tomohon
6. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 tahun 2021 Tentang Peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam

pengecehan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019

Penutupan jalan-jalan masuk ke setiap kelurahan-kelurahan juga menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat yang biasanya dipermudah dengan menggunakan jasa transportasi online untuk bepergian, akhirnya harus berjalan jalan jauh untuk mencari angkot di depan jalan raya karena kendaraan transportasi tak bisa masuk lebih jauh ke dalam lorong lorong di setiap kelurahan, tidak hanya itu saja, saat mewawancarai sejumlah komunitas transportasi online yang ada di kota Tomohon, mereka mengeluhkan masalah penutupan jalan-jalan masuk ke setiap kelurahan karena mereka sudah tidak bisa lagi menerima orderan, karena ketika akan masuk ke satu kelurahan mereka tidak diperisinkan masuk apabila bukan penduduk kelurahan tersebut. Belum lagi ada beberapa kelurahan yang mewajibkan masyarakatnya baik masyarakat yang akan keluar kampung dan masyarakat dari kampung tetangga yang akan masuk ke kampung mereka wajib harus mengantongi surat keterangan perjalanan dan surat keterangan berbadan sehat, hal tersebut juga sempat menyulut emosi beberapa warga Tomohon yang mereka lampiaskan ke social media berupa status status facebook yang mengejek masalah penutupan jalan, menurut masyarakat jika mereka tidak bisa keluar kampung untuk bekerja dan hanya tinggal dirumah saja maka pemerintah harus menyediakan segala kebutuhan mereka setiap hari. Selain penutupan jalan di setiap kelurahan, pemerintah Kota Tomohon juga mengadakan Pembatasan jam Operasional Pasar Extreme kota Tomohon,

Dibalik semua tindakan yang diambil pemerintah tentu ditujukan untuk kebaikan bersama, yaitu untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat dan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah covid- 19 ini. Dengan memandang tujuan pemerintah serta melihat respon masyarakat yang bervariasi ini maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap peran pemerintah terhadap penanganan wabah covid- 19. asangan calon selama masa kampanye.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif Adapun yang menjadi focus pada penelitian lapangan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini akan difokuskan pada Penanganan Wabah Covid-19 di Kota Tomohon.

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2012:247). Dalam penelitian kualitatif, tahapantahapan analisis data meliputi:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan

Pembahasan

Pandemi telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia. Di Indonesia sendiri telah

memberikan dampak signifikan dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor lain terkana imbasnya.

Peran pemerintah dalam upaya pengendalian penyebaran pandemi COVID-19 dengan kaitannya dengan kewenangan daerah. Berlandaskan norma hukum yang digunakan sebagai landasan kewenangan daerah yakni daerah dapat melaksanakan kewenangan sebesar-besarnya, selain hal yang berkaitan dengan suatu tugas eksekutif yang oleh regulasi ditetapkan sebagai tanggung jawab pusat. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintah di level lokal tetap harus bersandar pada regulasi yang dibentuk pusat

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T), memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien Covid-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia.

Pemerintah Kota Tomohon pemerintah kota tomohon terus berupaya menekan penyebaran covid-19 di kota tomohon melalui pelaksanaan tracing=pelacakan, testing =pemeriksaan dini dan treatment =perawatan (3t). selain itu percepatan pelaksanaan vaksinasi oleh setiap fasilitas kesehatan di Kota Tomohon. Pemerintah menyarankan bagi masyarakat yang belum divaksin agar segera mengikuti jadwal vaksinasi yang ada di fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya mengingatkan beberapa titik lengah masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan sehingga dapat terpapar covid-19, yaitu berkumpul bersama

teman karena merasa aman, makan bersama teman dan kerabat, foto bersama tanpa masker, kumpul keluarga yang tidak serumah dan menghadiri acara-acara yang mengabaikan protokol kesehatan. Oleh karena itu masyarakat harus selalu diingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Menyangkut ketersediaan tempat tidur untuk pasien di rumah sakit rsu anugerah ada 23 bed, rsu gunung maria 6 bed dan rsu bethesda 29 bed.

Strategi dan arah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19 yaitu melalui: pertama, aturan; penerapan aturan yang tertuang dalam perwako no. 28 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 dan perda no 1. tahun 2021 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. Pemerintah mengeluarkan surat edaran no 143/WKT/VII-2020 tentang penyesuaian sistem kerja asn dan tenaga kontrak di lingkup pemerintah Kota Tomohon, mengedarkan surat himbuan dan maklumat walikota tomohon. Pemerintah kota tomohon juga telah mengeluarkan edaran walikota tomohon nomor 291/WKT/VII-2021 tentang pengetatan protokol kesehatan covid-19 di kota tomohon tertanggal 5 Juli 2021 yang disampaikan kepada seluruh masyarakat kota tomohon melalui media massa dan peran para camat, lurah kepala lingkungan dan peran para tokoh-tokoh agama. kedua, sisi pelaksanaan ; -memperbanyak edukasi (untuk mengajak keterlibatan masyarakat dalam penanganan covid-19). -dokumentasi pelaksanaan

edukasi, -melakukan percepatan vaksinasi – menerapkan peraturan daerah no. 1 tahun 2021 dilakukan oleh sat pol pp dengan terus secara aktif melakukan pengawasan di seluruh wilayah kota tomohon,- pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran pembatasan aktifitas, - menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat untuk mengurangi dampak pandemi. sehingga perekonomian masyarakat dapat berjalan. kami pun selalu mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara dan tenaga kontrak untuk menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan 5 m. Begitujuga upaya pemerintah kota tomohon melalui ajakan dan himbauan kepada seluruh masyarakat penduduk Kota Tomohon yang berusia diatas 12 tahun keatas untuk datang dan menerima vaksin covid-19 melalui tempat-tempat pelaksanaan vaksin yang telah disiapkan pemerintah kota tomohon. baik di kantor-kantor kelurahan maupun di tempat-tempat strategis lainnya. seperti di kompleks pasar tomohon dan menara alva & omega. dengan harapan masyarakat yang belum divaksin dapat datang dan menerima vaksin secara gratis untuk kesehatan dan bagi kemanusiaan.

Di sektor ekonomi, pemberlakuan social distancing membuat ekonomi akan melambat dan lama-kelamaan akan terhenti karena terbatasnya interaksi pergerakan manusia dan pergerakan barang, Maka pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Dari hasil wawancara berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur telah diberikan dan sangat membantu masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema

kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Ada beberapa peranan penting yang dapat dilakukan masyarakat dalam menyukseskan kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Pertama, dengan cara jujur melaporkan kasus yang ada dan bersikap suportif saat dilakukan penjarangan kontak erat oleh petugas. Kedua, mematuhi persyaratan perjalanan, baik mengikuti prosedur yang sesuai maupun memperlihatkan dokumen prasyarat melalui prosedur yang benar tanpa kecurangan. Ketiga, mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi dengan syarat memenuhi seluruh persyaratan pra vaksinasi dan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan. Keempat, memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat terlebih dahulu demi prosedur isolasi yang terpantau dengan baik. Opsi isolasi mandiri di rumah dapat diambil sebagai jalan terakhir jika fasilitas isolasi terpusat tidak tersedia dan harus berada di bawah pengawasan Puskesmas setempat.

Penutup Kesimpulan

Pemerintah terus berupaya memperkuat upaya pencegahan guna meminimalisir dampak terburuk pandemi COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi lainnya Upaya pencegahan seperti penguatan *testing, tracing, dan treatment* juga vaksinasi terus dilakukan pemerintah untuk mencegah perluasan penyebaran virus COVID-19. Upaya mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan juga sudah dilakukan, termasuk menjaga tempat tidur rumah sakit tetap di angka optimal dan mampu merawat pasien yang

membutuhkan seperti pasien bergejala sedang, berat, kritis, dan memiliki komorbid. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengontrol lebih sedikit korban akibat COVID-19 adalah pembatasan sosial, meningkatkan tes, telusur, dan treatment, serta mempersiapkan rumah sakit dan tenaga kesehatan. Serta peran pemerintah dalam penanganan covid 19 di sektor ekonomi sosial yaitu dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat guna mencukupkan kebutuhan masyarakat.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah menambah lagi strategi-strategi dalam menanggulangi covid-19 sehingga angka covid 19 tidak bertambah. Peran pemerintah yang belum optimal tentunya masih dapat ditingkatkan jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pandemi *Covid-19* ini benar-benar dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat. Di sisi lain, pihak masyarakat sendiri sebaiknya saling bergotong royong atau bekerja sama untuk mengurangi dampak dari *Covid-19* ini baik dari sisi perekonomian, sosial atau dari sisi lain yang bisa membangkitkan perekonomian bersama sehingga tiga fungsi/peran pokok pemerintah dalam perekonomian dapat dilaksanakan dengan baik
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19, karena masih kurang studi yang dilakukan dibidang ini dan mengingat saat ini memasuki *new normal* dan sehingga pemerintah daerah mesti mengadaptasi dalam berbagai kebijakan di daerahnya dan hal ini tentunya menarik untuk

dijadikan
bahan penelitian

Daftar Pustaka

- Andi Prastowo. 2011. Metode Penelitian Kualitatif , Jogjakarta : Ae-Ruzz Media
- Cochrane Indonesia. 2020. Covid 19: Kumpulan Artikel. Trusted evidence Informed decisions Better health. (<https://indonesia.cochrane.org/news/covid-19-kumpulan-artikel-ilmiah>)
- Creswell, J.w. 2010. Research design : Pendekatan kualitatif, kuantitatif , dan mixed. Yogyakarta : PT PUSTAKA BELAJAR
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tomohon tahun 2020
- Gitiyarko V. 2020. Upaya dan Kebijakan Pemerintah Menangani Covid 19 . Kompas Pedia (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>)
- Moleong ,Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Santoso, H. 2005. Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wabah Penyakit Menular. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
- Sarwono,S. 2011. Psikologi Remaja. Jakarta: PT.Raja Grafindo
- Soekanto,Soerjono. 2012 Sosiologi suatu pengantar. Jakarta:Rajawali Pers
- Syam,Nina W.2014. Psikologi Sosial Sebagai Akses Ilmu Komunikasi. Bandung:CV Pustaka Setia
- Sumber lain:
Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon
UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<https://indonesia.cochrane.org/news/covid-19-kumpulan-artikel-ilmiah>
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/aparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>
<https://diskominfo.tomohon.go.id/>
<https://covid19.tomohon.go.id/>
<https://www.kompasiana.com//peran-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-menghadapi-covid-19>
https://www.bphn.go.id/data/documents/wabah_penyakit_menular.pdf
<https://theconversation.com/apa-bedanya-pandemi-epidemi-dan-wabah>